

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada masa kolonial, umat Islam di Indonesia mendirikan berbagai organisasi dan partai politik sebagai respons terhadap penindasan kolonial (Ricklefs, 1993). Salah satu organisasi yang penting dalam konteks ini adalah SI, yang didirikan pada awal abad ke-20 sebagai organisasi ekonomi untuk melawan dominasi ekonomi Belanda (Ricklefs, 1993). Seiring waktu, Serikat Islam berkembang menjadi organisasi politik yang memperjuangkan hak-hak sosial dan kemerdekaan Indonesia, dan pada tahun 1923, berubah nama menjadi PSI. Kemudian, pada tahun 1929, nama partai ini diubah lagi menjadi PSII sebagai bentuk konsolidasi dan penegasan identitas politik Islam yang lebih kuat dalam pergerakan nasional.

Setelah kemerdekaan Indonesia muncul berbagai partai politik Islam sebagai respons terhadap dinamika sosial dan politik yang berkembang, terutama menjelang Pemilu 1955. Beberapa partai Islam yang terbentuk pada periode ini antara lain PPTI, NU, PTI, dan Partai Masyumi (C. Suryana et al., 2024). Partai-partai ini memiliki latar belakang dan ideologi yang beragam, namun semuanya berfokus pada peran agama Islam dalam politik Indonesia. Masing-masing partai tersebut berusaha untuk mengartikulasikan aspirasi umat Islam dalam kerangka negara yang baru merdeka, sambil memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Jackson, 2023). Oleh karena itu,

kemunculan partai-partai Islam ini mencerminkan upaya umat Islam Indonesia untuk mempengaruhi arah kebijakan politik pasca-kemerdekaan.

Dinamika politik di tanah air semakin kompleks dengan munculnya kelompok-kelompok nasionalis, baik yang berafiliasi dengan Islam maupun non-Islam. Organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Taman Siswa, dan Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia memperlihatkan keberagaman ideologi dan tujuan dalam perjuangan kemerdekaan serta pembentukan negara yang baru (Hermawati, 2020). Di sisi lain, partai-partai politik Islam mengalami perpecahan internal yang cukup signifikan, di mana perselisihan antara elit politik menyebabkan fragmentasi (Mas'ad, 2019). Banyak dari elit politik ini lebih fokus pada kepentingan pribadi dan kelompoknya ketimbang memperjuangkan kesatuan dan keberlanjutan partai politik yang lebih besar. Selain itu, keberagaman etnis juga terlihat dalam perpolitikan Indonesia, di mana tidak hanya etnis Muslim pribumi yang terlibat dalam partai-partai Islam, tetapi juga etnis lain seperti Arab, yang diwakili oleh tokoh seperti A. R. Baswedan yang mendirikan PAI pada tahun 1908. Partai ini menjadi contoh awal dari keterlibatan etnis non-pribumi dalam politik Islam Indonesia, mengarah pada integrasi sosial dan politik yang lebih luas dalam masyarakat Indonesia yang multikultural.

Pemilu 1955 menjadi titik penting dalam sejarah politik Indonesia, di mana partai-partai Islam seperti NU, Masyumi, PPTI, dan PTI memainkan peran signifikan dalam menentukan arah politik negara yang baru merdeka (Alawi, 2019). Pemilu ini memungkinkan partai-partai Islam untuk menunjukkan

eksistensi politik mereka dan memperjuangkan pengaruh dalam pembuatan kebijakan negara. Meskipun perolehan suara yang cukup besar pada saat itu menunjukkan kekuatan politik mereka, banyak dari partai-partai Islam ini mengalami fragmentasi dan perubahan struktural dalam beberapa dekade berikutnya, seiring dengan pergeseran dinamika politik yang lebih luas, baik internal maupun eksternal (Federspiel, 2020). Beberapa faktor yang memengaruhi perubahan ini termasuk perbedaan ideologi internal, dampak dari kebijakan pemerintah yang lebih sentralistik, serta peran politik militer yang semakin dominan (Tirtayasa, 2025). Keberadaan partai-partai Islam ini, meskipun mengalami kemunduran, tetap memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan politik Islam di Indonesia, baik pada level nasional maupun daerah.

Perdebatan mengenai ideologi negara antara Pancasila dan Islam merupakan isu sentral yang muncul dalam BPUPKI (Priyono, 2023). Dalam menghadapi perbedaan pandangan antara ideologi nasionalis dan Islam, para pemimpin Islam berusaha menjalin kompromi dengan para pemimpin nasionalis untuk merumuskan dasar negara yang bisa diterima oleh semua pihak. Piagam Jakarta, yang disusun sebagai hasil kompromi tersebut, mencerminkan upaya untuk menciptakan kesepakatan yang inklusif di tengah perbedaan ideologi. Namun, meskipun terdapat kesepakatan, tantangan besar tetap ada dalam menjaga kesatuan di antara berbagai kelompok, yang dapat mengancam stabilitas politik negara yang baru merdeka.

Kompromi yang dihasilkan dalam Piagam Jakarta tidak sepenuhnya menghilangkan perbedaan mendalam antara kelompok-kelompok tersebut. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia menghadapi masalah besar dalam menjaga persatuan (Qothrunnada, 2021). Di satu sisi, kelompok Islam terus memperjuangkan penerapan syariat Islam dalam kehidupan negara, sementara kelompok nasionalis berfokus pada pembentukan negara sekuler berdasarkan Pancasila. Meskipun ada kesepakatan tentang dasar negara, isu-isu seperti kedudukan agama dalam negara dan pengaruh Islam terhadap kebijakan publik tetap menjadi perdebatan. Dalam konteks politik pasca-kemerdekaan, dinamika politik semakin kompleks ketika Presiden Soekarno lengser dan digantikan oleh Presiden Soeharto melalui surat mandat yang dikenal sebagai Supersemar tanggal 11 Maret 1986 (Danangpratama, 2021).

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, kelompok-kelompok Islam memberikan respons positif terhadap perubahan politik nasional, dengan mengorganisir diri melalui partai-partai politik seperti Masyumi, Perti, dan PSII (Azra, 1970). Dalam tubuh Masyumi sendiri, terdapat dua arus besar pemikiran Islam, yaitu kelompok modernis yang lebih rasional dan reformis serta kelompok tradisionalis yang menjunjung tinggi warisan keagamaan klasik. Ketegangan antara kedua kelompok ini memuncak ketika NU yang semula tergabung dalam Masyumi, memisahkan diri karena perbedaan pandangan politik dan ketidaksesuaian dalam distribusi kekuasaan, terutama dalam persoalan pembagian kursi kabinet (Hidayatullah, 2019). Masyumi menganggap sikap NU sebagai bentuk disloyalitas yang berpotensi mengganggu stabilitas politik internal partai.

Pada masa Orde Baru, pemerintah Indonesia melakukan penyederhanaan sistem kepartaian melalui kebijakan fusi partai politik pada tahun 1973. Kebijakan ini menggabungkan berbagai partai politik Islam ke dalam Partai Persatuan Pembangunan dan partai-partai nasionalis serta sekuler ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (Naku et al., 2024). Dalam UU No 19 tahun 1965 di luar dua partai ini, terdapat Golkar yang secara hukum dan konstitusional tidak dikategorikan sebagai partai politik, melainkan sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mewakili kekuatan sosial fungsional dalam masyarakat (Yuniarto, 2016). Golkar berfungsi sebagai kendaraan politik utama rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, dan memperoleh keistimewaan politik melalui dukungan birokrasi, militer, dan aparatur negara lainnya. Kehadiran Golkar sebagai kekuatan dominan menciptakan struktur politik semu multipartai yang bersifat hegemonik, di mana persaingan elektoral berlangsung secara formal, namun tanpa keseimbangan kekuasaan yang sejati. Dengan statusnya sebagai bukan partai politik Golkar mampu menghindari pembatasan yang dikenakan terhadap partai-partai politik lainnya, serta memperoleh keuntungan administratif dan logistik dalam setiap pemilu selama Orde Baru.

Rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama lebih dari tiga dekade berakhir pada Mei 1998, menyusul krisis ekonomi parah yang melanda Asia pada tahun 1997–1998 serta tekanan politik dan sosial yang semakin intensif dari berbagai elemen masyarakat (Suparno, 2012). Ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang otoriter, korupsi yang merajalela, serta pembatasan terhadap kebebasan politik dan hak sipil mendorong lahirnya gerakan reformasi

yang dipelopori oleh mahasiswa, masyarakat sipil, dan kelompok intelektual. Salah satu tuntutan utama dari gerakan ini adalah pembubaran struktur politik yang represif, termasuk dominasi tunggal Golkar dalam sistem kepartaian nasional. Salah satu dari runtuhnya Orde Baru adalah penghapusan sistem penyederhanaan partai yang diberlakukan sejak tahun 1973, yang sebelumnya membatasi eksistensi politik hanya pada tiga kekuatan: PPP, PDI, dan Golkar. Dengan dimulainya era Reformasi, kebebasan berpolitik dipulihkan melalui revisi Undang-Undang Partai Politik, yang memungkinkan pembentukan partai baru tanpa campur tangan negara secara represif.

Reformasi politik ini juga mencakup perubahan sistem pemilu yang lebih terbuka, pembatasan masa jabatan presiden, dan penguatan lembaga demokrasi. Kondisi ini menciptakan ruang politik baru bagi munculnya partai-partai berbasis ideologi, termasuk partai-partai Islam (Admin Indonesia investments, 2018). Salah satu yang paling menonjol adalah Partai Keadilan yang didirikan pada tahun 1998 dan kemudian bertransformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera pada tahun 2002 (Romli, 2011). PKS tampil dengan pendekatan yang lebih modern dan adaptif terhadap wacana politik kontemporer, berhasil menarik dukungan dari kelompok kelas menengah, pemuda, dan kalangan urban Muslim (Romli, 2011). Selain PKS, partai-partai Islam lainnya seperti PKB yang lahir dari basis Nahdlatul Ulama dan PPP tetap aktif dalam kontestasi politik, meskipun kerap kali terfragmentasi baik dalam orientasi ideologis maupun strategi politik.

Dalam menghadapi pemilu 2024, pelembagaan partai politik Islam di Indonesia setelah reformasi menghadirkan dinamika yang cukup kompleks.

partai-partai Islam juga harus memperhitungkan dinamika koalisi politik. Pemilu merupakan unsur pilar demokrasi sebagai sarana mengekspresikan hak aspirasi rakyat Indonesia yang menentukan pemimpin dan mempengaruhi kebijakan (Baihaqi, 2024). Melalui pemilu, rakyat Indonesia bisa berpartisipasi dalam memberikan hak suaranya. Di pemilu tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum mengumumkan ada 24 partai politik yang ikut berkontestasi dalam pesta politik dimana ada 18 partai politik nasional, dan 6 partai politik lokal Aceh (KPU, 2022). partai-partai Islam di Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam mempertahankan relevansi politik mereka. Meskipun beberapa partai Islam telah berhasil memperkuat kelembagaan internal, mereka masih harus bersaing dengan partai-partai sekuler yang memiliki dukungan lebih luas. Koalisi politik menjadi kunci bagi partai-partai Islam untuk memperbesar peluang mereka dalam memenangkan kursi legislatif, namun kesulitan dalam mencapai kesepakatan koalisi yang solid seringkali menjadi hambatan.

Pada tanggal 20 Maret 2024, keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil suara pemilihan legislatif 2024 pada hasil pengumuman terdapat 8 partai politik yang lolos dan 10 partai politik yang tidak lolos ke parlemen 2024 (Jimenez Salim, 2024). Dari hasil pengumuman tersebut 8 partai politik yang lolos ke parlemen diantaranya PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat, serta 10 partai politik tidak lolos adalah Partai Buruh, Partai Gelora, PKN, Partai Hanura, Partai Garuda, PBB, PSI, Perindo, PPP dan Partai Ummat (Jimenez Salim, 2024). Menariknya dari 10 partai politik yang tidak lolos ke parlemen, ada 1 partai politik yang ingin

dijadikan topik penelitian yaitu PPP.

PPP didirikan pada tanggal 5 Januari tahun 1973 (Tempo, 2023). PPP ingin memprioritaskan keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. (A. PPP, 2022). Sejak keikutsertaannya dalam pemilihan umum pertama pada tahun 1977, PPP telah mengalami berbagai dinamika politik yang mempengaruhi perolehan suaranya. Pertama kali PPP sudah mengalami masalah internal pada tahun 1982. Pada saat itu, Jaelani Naro, ketua umum partai, menciptakan sistem kepemimpinan oligarkis untuk kepentingan pribadi, yang merusak citra partai di mata masyarakat dan mencoreng reputasinya sebagai partai politik Islam (Basyaib, Hamid, 1999). Lebih lanjut, perselisihan internal kembali memanaskan pada tahun 2014 sebagai akibat dari dualisme kepengurusan di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di bawah struktur fraksi PPP di DPR.

Pada Pemilu 2004, PPP berusaha untuk pulih dengan meningkatkan perolehan suaranya, meskipun tidak mencapai puncak perolehan suara sebelumnya. Pada saat itu, ketua fraksi PPP kubu Romy meluapkan kemarahannya dengan mengebrak meja dalam rapat paripurna DPR yang membahas komposisi anggota dewan dan alat kelengkapan dewan (Riswandi, 2014). Meskipun memperoleh jumlah suara yang signifikan pada awal karir politiknya, PPP menghadapi tantangan persaingan dengan partai-partai lain dan dinamika politik nasional yang terus berubah. Pada pemilu 2019, PPP meraih hasil pemilu yang stabil dan menunjukkan dukungan yang kuat dari para pemilih tradisionalnya. Menatap pemilu 2024, PPP bertujuan untuk melakukan konsolidasi internal dan memperkuat jaringannya di masyarakat, sembari

menyadari pentingnya beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks (Hana, 2024).

Adapun perolehan suara PPP sejak mengikuti pemilihan umum tahun 1977 sampai pemilihan umum tahun 2024 dapat dilihat dibawah ini.



Tabel 1. 1 Hasil Suara PPP dalam Pemilu tahun 1977-2024

No	Tahun Pemilu	Jumlah suara	Persentase Jumlah Kursi	Jumlah Kursi Parlemen
1	1977	18. 743. 491	29,29%	99 Kursi
2	1982	20. 871. 880	27,78%	94 Kursi
3	1987	13. 701. 428	15,97%	61 Kursi
4	1992	16. 624. 647	17%	62 Kursi
5	1997	25. 340. 028	22,43%	89 Kursi
6	1999	11. 329. 905	12,55%	51 Kursi
7	2004	9. 248. 764	10,55%	58 Kursi
8	2009	5. 533. 214	6,79%	38 Kursi
9	2014	8. 157. 488	7%	39 Kursi
10	2019	6. 323. 147	4,52%	19 Kursi
11	2024	5. 878. 777	3,87%	0 Kursi

Sumber: (KPU, 2024)

Dari tabel diatas Partai Persatuan Pembangunan sudah mengikuti 11 kali dalam pemilihan legislatif. Namun dari tahun 1977-2019 partai selalu lolos ke senayan dalam pemilihan legislatif akan tetapi pada pemilu 2024 partai ini mengalami penurunan jumlah suara kursi dan mengakibatkan tidak lolos ke parlemen. Pada pemilihan umum tahun 1999-2014 perolehan suara dan kursi partai persatuan pembangunan naik turun akan tetapi partai ini bisa lolos ke parlemen. Permasalahan PPP pada pemilu tahun 2024 partai ini mengalami penurunan suara secara signifikan 3,87% yang mengakibatkan partai ini untuk pertama kalinya

sejak mengikuti pemilihan umum di tahun 1977 tidak lolos ke parlemen (Admin Tempo, 2024). Berdasarkan Undang-undang nomor 17 tentang pemilihan umum pasal 414 ayat 1 syarat partai politik masuk ke parlemen minimum 4% hasil suara kursi (Bernadetha Aurelia Oktavira, 2024). Oleh karena itu dengan perolehan tersebut maka suara PPP tidak memenuhi syarat masuk ke parlemen di tahun 2024.

1.2. Rumusan Masalah

Pada Pemilu 2019, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghadapi berbagai tantangan politik yang signifikan, meskipun partai ini memiliki sejarah panjang dalam politik Indonesia. Salah satu langkah strategis PPP dalam Pemilu 2019 adalah bergabung dengan KIK yang didominasi oleh PDI-P, bersama dengan partai-partai besar lainnya, seperti Partai Golkar dan Partai NasDem (Subekti, 2019). Koalisi ini mendukung pencalonan Presiden Joko Widodo untuk periode kedua, yang menjadi langkah penting bagi PPP untuk memastikan pengaruhnya dalam pemerintahan jika pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin terpilih (Rahadian, 2018). Dalam konteks koalisi, PPP memiliki peran penting dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam, mengingat Ma'ruf Amin, yang merupakan calon wakil presiden, memiliki kedekatan dengan kalangan ulama. Program-program yang diusung PPP dalam Pemilu 2019 pun banyak berfokus pada isu-isu sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan mengedepankan nilai-nilai keagamaan yang menjadi ciri khas PPP.

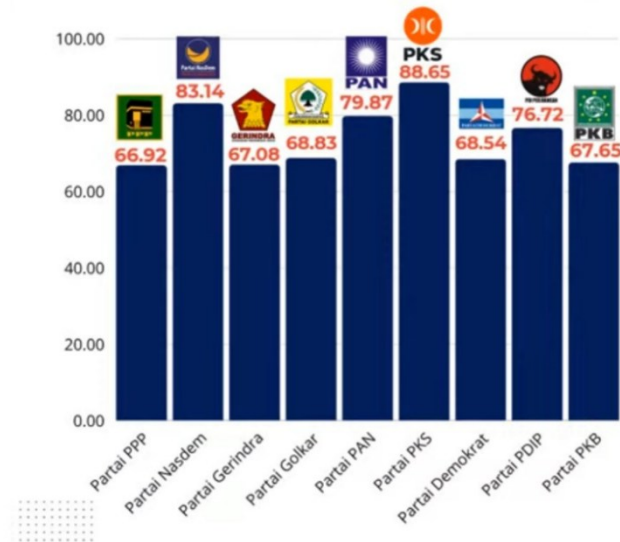
PPP berusaha menunjukkan bahwa mereka dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat Indonesia, baik dalam bidang sosial-ekonomi maupun politik, khususnya dalam mendorong kesejahteraan umat Islam. Dalam hal strategi komunikasi, PPP mengandalkan platform konvensional untuk menyampaikan pesan politiknya, seperti kampanye door-to-door dan penggunaan tokoh-tokoh agama dalam kegiatan politiknya (Umy, 2020). Meskipun demikian, PPP juga mulai mencoba mengadopsi pendekatan lebih modern, seperti memanfaatkan media sosial untuk menjangkau pemilih muda, yang semakin penting dalam Pemilu 2019. Secara struktural, PPP memanfaatkan jaringan organisasi keagamaan yang dimilikinya untuk memperkuat dukungan di kalangan pemilih muslim tradisional. Dengan program-program yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup, PPP berupaya untuk mempertahankan dukungannya di daerah-daerah yang menjadi basis tradisional mereka.

Menjelang Pemilu 2024, PPP menghadapi sejumlah fenomena yang mencerminkan dinamika politik Indonesia. PPP, sebagai salah satu partai politik yang memiliki sejarah panjang dalam kancah perpolitikan Indonesia. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi fenomena ini adalah krisis kepemimpinan yang telah terjadi dalam tubuh PPP. Partai ini mengalami perubahan kepemimpinan yang cukup sering, yang menurunkan stabilitas organisasi dan memengaruhi kepercayaan publik terhadap kinerja partai. Pada 2022, terjadi dualisme kepemimpinan antara Suharso Monoarfa dan Muhammad Mardiono, yang menguras energi partai dan mengalihkan fokus dari persiapan pemilu

(Sidik, 2022). PPP menghadapi sejumlah dinamika penting terkait dengan strategi koalisi politik. Seiring dengan ketatnya persaingan politik, PPP memutuskan untuk bergabung dalam koalisi dengan partai-partai besar guna memperbesar peluangnya dalam meraih kursi di parlemen. Salah satu koalisi utama yang dibentuk PPP adalah dengan Partai Golkar, PAN, dan beberapa partai lainnya dalam koalisi yang dikenal dengan nama KIB (Nicholas Ryan Aditya, 2022). Secara strategis, PPP memilih bergabung dalam koalisi ini untuk memperkuat posisi tawar mereka dalam politik nasional. KIB dianggap sebagai koalisi yang dapat memberikan platform yang lebih stabil untuk memperebutkan kursi di legislatif dan menyukseskan pencalonan Presiden. Meskipun PPP memiliki sejarah panjang dalam politik Islam, koalisi ini menunjukkan bahwa partai ini ingin lebih memperkuat posisinya di tengah semakin beragamnya peta politik Indonesia.

Pada saat pemilu 2024 di tanggal 30 April 2023, PDI-P dan PPP menandatangani kesepakatan kerja sama politik untuk mengukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (Khoirunnisaa, 2023). Namun, meskipun koalisi ini dibentuk dengan tujuan yang jelas, tantangan besar tetap dihadapi dalam hal konsolidasi internal dan strategi pemenangan yang efektif. Perbedaan ideologi dan basis pemilih antar partai dalam koalisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kesolidan dan mencapai tujuan bersama (Gaffar, 2023). Terdapat gambar indeks partai pemilu 2024 dan analisis gambar sebagai berikut:

Gambar 1. 1 . Indeks Pelembagaan Partai Politik Pemilu 2024



Sumber: (BRIN, 2024)

Berdasarkan data Badan Riset Inovasi Nasional terdapat sembilan partai politik yang memiliki indeks pelembagaan partai politik pemilu di tahun 2019. Di pemilu 2024 ada satu partai politik yaitu PPP merupakan yang paling lemah dalam pelembagaan partai. Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa dalam segi pelembagaan partai, PPP menempati posisi terlemah dengan skor 66,92 % (BRIN, 2024). Tidak tercapainya ambang batas perolehan suara PPP ke senayan disebabkan karena melemahnya pelembagaan partai (Antaranews, 2024). Kelemahan ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam hubungan internal dan eksternal dalam menghadapi pemilu 2024 (Saptohutomo Putranto, 2024). Pelembagaan partai adalah proses penting untuk membangun fondasi yang kuat dalam organisasi politik (Gerald, 2019). Proses ini melibatkan pembuatan struktur organisasi, aturan dan prosedur yang jelas sehingga setiap anggota dapat berkontribusi secara efektif. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka

penelitian ini terfokus untuk membahas pelebagaan partai politik di Indonesia: strategi pelebagaan PPP dalam pemilihan legislatif 2024.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penyusunan latar belakang dan rumusan masalah diatas, adapun pertanyaan penelitian ini adalah

1. Bagaimana strategi pelebagaan politik Partai Persatuan Pembangunan pemilihan legislatif tahun 2024?
2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat pelebagaan Partai Persatuan Pembangunan pada pemilihan legislatif tahun 2024?

1.4. Tujuan Penelitian

Dalam tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu tujuan akademik dan tujuan praktis.

1. 4. 1 Tujuan Akademik

Adapun tujuan akademik dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi strategi pelebagaan politik Partai Persatuan Pembangunan pemilihan legislatif tahun 2024.
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat pelebagaan Partai Persatuan Pembangunan pada pemilihan legislatif 2024.

1. 4. 2 Tujuan Praktis

Adapun tujuan praktis dari penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu prasyarat dalam meraih gelar sarjana Ilmu Politik (S. Sos) pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia
2. Hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi PPP pada pemilihan legislatif 2024
3. Hasil penelitian dapat menjadi rekomendasi untuk PPP dalam strategi pelebagaan menghadapi pemilihan legislatif menadatang.

1.5. Signifikansi Penelitian

Dalam signifikasi penelitian akan menghasilkan dampak positif dan tercapainya tujuan penelitian

1. 5. 1 Signifikansi Akademik

Dalam signifikasi penelitian pada penelitian ini adalah memberikan kontribusi penting bagi pengembangan studi kelembagaan partai politik di Indonesia, khususnya dalam konteks pascareformasi. Dengan memfokuskan pada strategi pelebagaan Partai Persatuan Pembangunan, penelitian ini menawarkan wawasan baru mengenai tantangan yang dihadapi partai dalam membangun kelembagaan yang kuat. Studi ini menggunakan teori pelebagaan partai politik dari Randall dan Svasand, yang memberikan kerangka analitis untuk mengkaji seberapa baik PPP menerapkan dimensi kesisteman, identitas nilai, otonomi

keputusan, dan citra publik. Melalui analisis ini, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang transformasi partai politik di negara demokrasi baru, khususnya dalam pemilu legislatif. Kontribusi teori ini terletak pada aplikasi kerangka kelembagaan yang lebih komprehensif untuk memeriksa efektivitas dan keberlanjutan institusionalisasi partai politik di Indonesia.

Secara lebih luas, temuan penelitian ini dapat memperdalam pemahaman mengenai hubungan antara kelembagaan partai dan performa politik partai dalam pemilu. Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam menggali faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan pelebagaan partai politik di Indonesia.

1. 5. 2 Signifikansi Praktis

Secara praktis, penelitian ini untuk memperkuat dan memperdalam wawasan peneliti salah satunya matakuliah yang dipelajari studi partai pemilu dan politik. Melalui penelitian ini juga pengetahuan mengenai partai politik akan diperdalam bila mengangkat studi kasus fenomena strategi pelebagaan Partai Persatuan Pembangunan dalam pemilihan legislatif tahun 2024. Dalam matakuliah studi partai politik pemilu akan diperdalam melalui penelitian ini akan memperdalam lagi. Bagi prodi Ilmu Politik akan menambah hasil-hasil penelitian sebelumnya dan juga akan menjadi landasan bagi penelitian-penelitian yang akan datang dan juga mengkaji yang berkaitan dengan partai politik.

1.6. Kajian Pustaka

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dari penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini juga akan diuraikan terkait perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Nur Istyan Harun, Suaib Napir, Muten Nuna, Robby Hunawa, Nirmala A. Sahi dengan judul jurnal *Strategi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Di Kabupaten Gorontalo Tahun 2019* dan telah dipublikasi Governance Jurnal Ilmu Pemerintahan (Istyan Harun et al., 2023). Metode pendekatan yang digunakan adalahn penelitian deskriptif kualitatif dengan metode analitis untuk mengeksplorasi aspek-aspek yang kompleks dan konteks-spesifik dari strategi komunikasi politik. Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa observasi terlibat pada acara-acara politik PPP seperti rapat partai, kampanye, dan pertemuan dengan masyarakat. Observasi ini akan memberikan pemahaman langsung tentang bagaimana strategi komunikasi diterapkan dalam situasi nyata, wawancara langsung dilapangan terhadap anggota PPP, termasuk tokoh-tokoh senior, kader, dan pengurus partai di Kabupaten Gorontalo. Wawancara ini akan menggali pandangan mereka tentang strategi komunikasi yang telah dan sedang dilaksanakan dan analisis dokumen resmi partai, pernyataan publik, materi kampanye, dan tulisan media terkait PPP di Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian menunjukan strategi

komunikasi politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa strategi pemenangan Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gorontalo dalam pemilihan legislatif 2019 menggunakan strategi pemenangan yang memanfaatkan marketing politik untuk strategi kampanye baik untuk mendapatkan dukungan politik dalam pemilihan umum maupun untuk memelihara citra sepanjang saat dalam jeda pemilu.

2. Penelitian ini dilakukan Fitria Barokah dengan judul Tesis *Strategi Partai Politik Baru Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Pada Partai Politik Gelombang Rakyat Indonesia Dan Partai Ummat Provinsi Lampung)* dan telah dipublikasi oleh digilib. unila. ac. id Universitas Lampung. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pembentukan partai baru dari Demirkol (2014) serta teori strategi bersaing dari Paul Lucardie (2000) meliputi proyek politik, sumber daya partai, dan struktur peluang politik. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Partai Gelora dan Partai Ummat dibentuk atas dasar perpecahan internal PKS dan PAN (Barokah, 2023).
3. Penelitian ini dilakukan Saharuddin dengan judul Tesis *Strategi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dalam Memenangkan Pemilu Legislatif Kabupaten Majene Tahun 2019 (Upaya caleg PPP Salmawati Jamado dalam meraih suara pada Pemilihan Legislatif Kabupaten Majene Tahun 2019)* dan telah dipublikasi oleh unhas. ac. id Universitas Hasanudin

Makasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mewawancarai beberapa informan dipadukan dengan study literatur jurnal dan penelitian ilmiah lainnya. Data kemudian diolah dengan pisau analisis teori Partai Politik, Institusionalisasi Parpol dan Strategi Politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Persatuan Pembangunan berhasil memenangkan Pemilu Legislatif Kabupaten Majene tahun 2019 (Saharudin, 2023)

4. Penelitian ini dilakukan Titis Perdani dengan judul Jurnal *Pelambagaan Partai Politik Golongan Karya "GOLKAR" (Studi Kasus di Tiga Daerah: Kota Pekalongan, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Banjarnegara)* dan telah dipublikasi di Jurnal Politik Universitas Jenderal Sudirman. Penelitian ini mix method dengan proporsi dominan menggunakan metode kualitatif ditunjang metode kuantitatif sederhana berupa survei. Penelitian ini menggunakan teori pelebagaan milik Mathias Basedau dan Alexander Stroh. Kajian yang dilakukan di setiap daerah dilakukan dengan menganalisis berbagai faktor menggunakan 4 dimensi pelebagaan (*roots in society, autonomy, level of organization dan coherncy*) dan 15 indikator. Hasil temuan, faktor penentu pelebagaan partai Golkar di Kota Pekalongan dipengaruhi oleh faktor, figur pemimpin yang kuat dan cenderung sentralistis, penguatan dan pengelolaan kader dilakukan dengan perekrutan kader yang sudah memiliki peran di masyarakat dan adanya program partai yang berkelanjutan berupa "giat pengobatan gratis"(Perdani, 2018).

5. Penelitian ini dilakukan Mei Katrin Rahayu dengan skripsi judul *Strategi Peningkatan Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan Dalam Pemilu Legislatif Di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Tahun 2024* dan telah dipublikasi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1446. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang relevan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Data yang dikumpulkan dianalisis untuk menggambarkan strategi kampanye yang digunakan oleh PPP, termasuk bagaimana partai ini berkomunikasi dengan pemilih, mengelola citra partai, dan memobilisasi dukungan melalui tokoh masyarakat setempat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup konsep-konsep dari Adman Nursal terkait political marketing, yang memberikan dasar analitis untuk memahami pendekatan yang diambil oleh PPP dalam meningkatkan dukungan pemilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPP berhasil meningkatkan perolehan suaranya dalam Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Pesisir Barat tahun 2024 melalui kombinasi strategi kampanye yang efektif (Perdani, 2018)

Dari lima penelitian terdahulu yang diuraikan, penelitian yang paling relevan untuk dijadikan rujukan utama dalam mendukung topik “Pelebagaan Partai Politik di Indonesia: Strategi Pelebagaan Partai Persatuan Pembangunan dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2024” adalah penelitian Saharuddin (2023) yang berjudul Strategi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Memenangkan

Pemilu Legislatif Kabupaten Majene Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan secara eksplisit menempatkan teori partai politik, institusionalisasi partai, serta strategi politik sebagai kerangka analisisnya. Hal ini menunjukkan bahwa fokus utama penelitian tidak hanya pada strategi kampanye atau komunikasi politik semata, melainkan juga mencakup aspek struktural dan kelembagaan internal partai yang selaras dengan studi mengenai pelebagaan partai politik.

Adapun persamaan antara penelitian Saharuddin dengan topik Anda terletak pada subjek penelitian, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan fokus pada upaya memenangkan pemilu legislatif. Namun, perbedaannya terletak pada konteks temporal dan ruang lingkup analisis. Penelitian Saharuddin berfokus pada konteks lokal (Kabupaten Majene) dan pemilu 2019, sedangkan penelitian Anda mengarah pada konteks nasional atau regional dalam Pemilu Legislatif 2024, yang diwarnai oleh tantangan baru seperti kegagalan PPP menembus ambang batas parlemen, disintegrasi basis pemilih Islam, serta urgensi restrukturisasi internal partai. Dari sisi research gap, studi Saharuddin belum mengkaji pelebagaan secara sistematis dengan menggunakan teori mutakhir seperti yang ditawarkan oleh Samuel Huntington (dimensi adaptability, complexity, autonomy, coherence) atau Angelo Panebianco (systemness, value infusion, reification). Oleh karena itu, penelitian ini berpotensi menawarkan novelty melalui pemetaan pelebagaan PPP menggunakan kerangka teoretis yang lebih komprehensif dan kontekstual, sekaligus menjawab tantangan aktual yang

dihadapi PPP dalam pemilu 2024 yang menggunakan teori pelebagaan partai politik Randall dan Svasand.

Dengan menggabungkan analisis strategi politik dan dimensi kelembagaan, penelitian ini akan memperluas cakupan teoritis dan memperkuat argumen ilmiah mengenai pentingnya reformasi internal sebagai bagian dari proses pelebagaan partai politik di Indonesia.

1.7. Landasan Teori/Konseptual

1. 7. 1 Teori Pelebagaan Partai Politik

Dalam literatur mengenai pelebagaan partai, sering kali terdapat kecenderungan untuk mengabaikan perbedaan antara pelebagaan partai dan sistem pelebagaan secara keseluruhan. Menurut Huntington juga menjelaskan bahwa pelebagaan partai politik merupakan suatu proses organisasi dalam mencapai stabilitas nilai-nilai tertentu. Proses pelebagaan ini mencakup dua aspek, yaitu aspek internal-eksternal dan aspek struktural-kultural. Samuel Huntington mengidentifikasi empat dimensi dalam pelebagaan partai politik, yaitu kemampuan beradaptasi, kompleksitas, otonomi dan koherensi (Samuel Huntington, 1968). Kemampuan beradaptasi merupakan bahwa semakin kaku sebuah organisasi dalam beradaptasi, maka semakin rendah tingkat pelebagaannya. Sebaliknya, jika organisasi dapat beradaptasi dengan baik, maka semakin tinggi tingkat pelebagaannya (Samuel Huntington, 1968).

Dalam hal kompleksitas merupakan semakin kompleks sebuah organisasi, semakin besar tingkat pelebagaannya. Otonomi merupakan mengukur

kemampuan sebuah organisasi politik untuk berfungsi secara independen dari organisasi perilaku sosial atau teknis lainnya (Samuel Huntington, 1968). Koherensi adalah semakin solid dan terintegrasi sebuah organisasi, semakin besar tingkat pelembagaannya (Samuel Huntington, 1968). Pemikiran ini dikembangkan lebih luas oleh Panebianco melalui tulisannya partai politik yang berfokus pada partai-partai di negara demokrasi yang mapan, pelembagaan partai adalah suatu proses yang kompleks dan dinamis yang dimana memiliki kekuatan internal dan eksternal partai yang berbeda berinteraksi untuk mempengaruhi bagaimana partai beroperasi dan beradaptasi (Panebianco, 1988). Teori Randal dan Svasand tentang pelembagaan partai politik mengemukakan bahwa proses pelembagaan partai politik melibatkan pembangunan struktur yang stabil, aturan yang jelas, serta kemampuan partai untuk bertahan dan beradaptasi dalam jangka panjang dalam sistem politik.

Randal dan svasand mensiflikasikan pendapat-pendapat para ahli mengenai partai politik tersebut menjadi kesatuan variabel yang saling berkaitan satu sama lainnya. Proses pelembagaan ini dibagi menjadi dua aspek yaitu aspek internal-eksternal dan aspek struktural-kultural (Vicky Randal dan Lars Svasand, 2002a),. Dalam dua aspek Ia memberikan pandangan empat dimensi pada indikator teori yaitu:

Tabel 1.7.1 Dimensi Teori Pelembagaan Partai Politik Randal dan Svasand

Dimensi	Internal	Eksternal
Struktural	Kesisteman	Otonomi Keputusan (<i>Decisional</i>)

<i>(Structural)</i>	<i>(Systemness)</i>	<i>Autonomy)</i>
Kultural <i>(Kultural)</i>	Identitas Nilai <i>(Value</i> <i>Infusion)</i>	Citra Publik <i>(Reifikation)</i>

Sumber: (Vicky Randal dan Lars Svasand, 2002b)

Adapun dimensi pelebagaan partai politik pada tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut (Vicky Randal dan Lars Svasand, 2002c):

1. *Systemness* (kesisteman) merupakan persilangan aspek internal dan struktural, Kesisteman adalah sebuah proses pelaksanaan fungsi partai politik, termasuk resolusi konflik, dilakukan sesuai dengan aturan, persyaratan, prosedur dan mekanisme yang disepakati dan diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik.
2. *Value infusion* (identitas nilai) merupakan hasil dari persilangan aspek internal dengan kultural. Identitas nilai adalah keberhasilan partai dalam menciptakan budaya atau sistem nilai yang khas dan dapat dilihat sebagai aspek penting dari kohesi partai.
3. *Decisional autonomy* (otonomi keputusan) adalah suatu partai dalam pembuatan keputusan (*decisional autonomy*) sebagai hasil persilangan aspek eksternal dan struktural. Otonomi keputusan adalah di mana sebuah partai tidak sepenuhnya bergantung pada lembaga atau kelompok sponsor atau hanya dalam beberapa pengertian netral 'terkait' dengannya (dalam literatur 'keterkaitan' umumnya dianggap sebagai hal yang baik. Jika partai jelas merupakan elemen dominan dalam hubungan tersebut, tingkat saling ketergantungan dapat memiliki positif, dalam hal memperluas sumber daya (yang mungkin sangat dibutuhkan) dan, tentu saja pelebagaan eksternal,
4. *Reifikation* (citra publik) terhadap suatu partai politik sebagai aspek persilangan dari aspek eksternal dengan aspek kultural. Reifikation (citra publik) merupakan sejauh mana keberadaan partai terbentuk dalam imajinasi publik.

Teori pelebagaan partai politik Randal dan Svasand merupakan teori yang akan digunakan pada penelitian ini sebagai teori utama dalam fenomena penelitian strategi pelebagaan Partai Persatuan Pembangunan pemilihan legislatif 2024 Analisis penulis pada topik penelitian ini dalam menggunakan teori pelebagaan partai politik Randal dan Svasand adalah bagaimana PPP telah menjalankan

proses pelebagaan tersebut dalam menghadapi tantangan politik yang semakin kompleks menjelang Pemilu 2024.

1. 7. 2 Konsep Pemilu

Pemilu merupakan salah satu pilar utama demokrasi, karena memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan. Melalui pemilu, warga negara dapat mengekspresikan preferensi politik mereka, memilih pemimpin yang mereka yakini mewakili kepentingan mereka, dan memberikan legitimasi kepada pemerintah terpilih. Proses ini umumnya diatur oleh hukum dan berlangsung secara berkala, dengan tujuan untuk memastikan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas sistem politik. Hgarris G. Warren berpendapat bahwa pemilu adalah kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat pemerintah dan menentukan apa yang mereka inginkan dari pemerintah (G Waren, 1983). Dengan demikian, pemilu tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memilih pemimpin, tetapi juga sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dalam menentukan arah pemerintahan dan kebijakan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat enam asas yang dikenal dengan Luber-Jurdil, yaitu (Anisa, 2024):

1. Langsung. Pemilih memilih secara langsung tanpa perantara, sehingga suaranya dapat mencerminkan kehendak pribadinya.
2. Umum. Semua warga negara yang memenuhi syarat mempunyai hak untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi berdasarkan asal suku, agama, ras, gender atau status sosial.
3. Bebas. Setiap pemilih mempunyai kebebasan dalam menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
4. Rahasia. Pilihan pemilih dijamin kerahasiaannya, sehingga tidak ada pihak

- yang mengetahui siapa yang dipilih pemilih.
5. Jujur. Seluruh proses pemilu harus dilaksanakan secara jujur oleh semua pihak yang terlibat, termasuk penyelenggara dan peserta pemilu.
 6. Adil. Seluruh pemilih dan peserta pemilu harus diperlakukan sama dan bebas dari kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu.

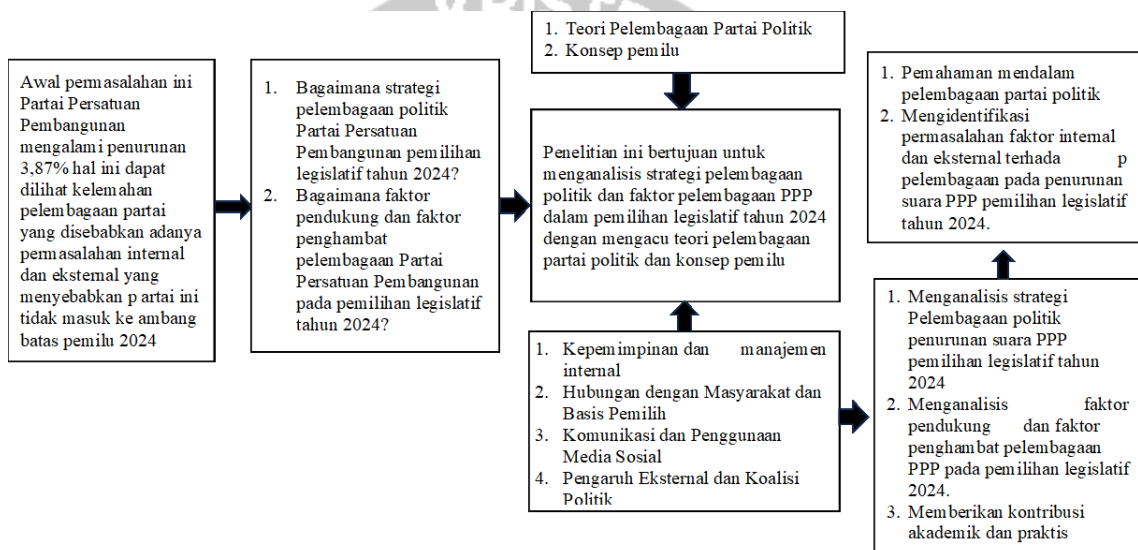
Pemilu merupakan salah satu pilar utama demokrasi, karena memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan. Tujuan pemilu di Indonesia sangat penting dalam konteks demokrasi dan kedaulatan rakyat. Pemilu bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat yang akan mewakili aspirasinya. Melalui pemilu, masyarakat dapat langsung memilih siapa yang akan menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Hal ini menciptakan legitimasi bagi pemerintahan terpilih, karena ia menerima mandat langsung dari rakyat untuk menjalankan pemerintahan. Pemilu juga berfungsi sebagai sarana menjaga stabilitas politik. Dengan pemilu yang teratur dan adil, masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan keinginannya secara damai, sehingga mengurangi potensi konflik politik. Pemilu yang transparan dan berkualitas membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan pemerintahan serta mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Analisis penulis topik penelitian dalam menggunakan konsep pemilihan umum pentingnya pelembagaan partai, PPP dapat merumuskan strategi yang lebih tepat untuk meraih dukungan yang signifikan dalam pemilihan legislatif 2024.

1.8. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada penelitian tersebut memiliki alur pemikiran dalam proses analisis suatu peneliti dari bagan sebagai berikut. Alur pemikiran adalah tahapan-tahapan dalam proses analisis penelitian. Alur pemikiran penelitian dalam judul Pelembagaan Partai Politik Di Indonesia: Strategi Pelembagaan PPP Dalam Pemilihan Legislatif 2024.

Gambar 1. 8 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan gambar diatas Penelitian ini mengkaji Partai Persatuan Pembangunan mengalami penurunan 3,87% hal ini dapat dilihat kelemahan pelebagaan partai yang disebabkan adanya permasalahan internal dan eksternal yang menyebabkan partai ini tidak masuk ke ambang batas pemilu 2024. Pada kerangka pemikiran didukung melalui teori dan konsep untuk menjawab penelitian adalah teori pelebagaan partai politik dan konsep pemilu. Penelitian ini berfokus pada strategi pelebagaan PPP penurunan suara pada pemilihan legislatif tahun 2024 dan faktor pendukung dan faktor penghambat PPP pada pemilihan legislatif tahun

2024. Melalui teori ini, penelitian ini mengidentifikasi faktor internal dan eksternal pelebagaan penurunan suara PPP dalam pemilihan legislatif tahun 2024. Penelitian juga menjadi bahan evaluasi bagi PPP dalam pemilihan legislatif tahun 2024, rekomendasi untuk PPP dalam strategi pelebagaan menghadapi pemilihan legislatif menadatang setrta kontribusi terhadap Ilmu Politik.

1.9. Metode Penelitian

1. 9. 1 Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono (2009) metode kualitatif suatu kondisi objek dimana penelitian sebagai instrumen penelitian teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumen dimana hasil penelitian bersifat temuan potensi dan masalah, keunikan objek, makna suatu peristiwa, proses, dan interaksi sosial (Sugiyono, 2009). Metode penelitian deskriptif analisis adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan (Sugiyono, 2009). Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi pelebagaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam konteks Pemilihan Legislatif Tahun 2024 di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menggali proses dan dinamika pelebagaan partai politik, dengan menekankan pada bagaimana PPP mengelola dan memperkuat struktur internal serta eksternal dalam menghadapi pemilihan legislatif tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan analisis

dokumen. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai potensi dan masalah yang dihadapi PPP pada pemilihan legislatif tahun 2024

1. 9. 2 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah struktur sistematis yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis data. Dalam penelitian in Studi kasus menurut Robert K. Yin (2014) adalah Yin menggambarkan studi kasus sebagai metode penelitian yang menyelidiki fenomena terkini dalam situasi nyata, di mana perbedaan antara fenomena dan konteksnya sering kali sulit untuk dipisahkan (Hollweck, 2016). Fokus pada penelitian ini adalah konteks internal dan eksternal yang memengaruhi strategi pelebagaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Pemilu 2024.

1. 9. 3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono yang dilanjutkan Sena Wahyu teknik pengumpulan ada tiga macam observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini hanya menggunakan satu teknik pengumpulan data yaitu wawancara. Dalam penelitian ini dapat menggunakan teknik pengumpulan data serta penjelasan dalam mendukung penelitian sebagai berikut:

1. Wawancara: Wawancara terbuka adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan dengan menggunakan pertanyaan yang bersifat fleksibel dan tidak terstruktur (Purwanza, 2022). Wawancara ini dilakukan

secara terbuka dan mendalam. Dalam wawancara ini dapat dilakukan melalui secara langsung maupun telepon. Wawancara pada informan yaitu Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Bidang Pemenangan Pemilu 2024, Sekretaris Jenderal GPK PPP, Ketua OKK DPP PPP, Peneliti Kajian Politik, Calon Legislatif DPR RI PPP Dapil 11 Jawa Barat, Mahasiswa UIN Jakarta yang tergabung Kader Organisasi PMII. Dalam wawancara menanyakan terkait masalah internal dan eksternal terhadap penurunan suara PPP pada pemilihan legislatif tahun 2024.

2. Studi dokumentasi: Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai jenis dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Creswell Catatan tersebut dapat berupa catatan tertulis, laporan, notulensi, artikel, publikasi atau dokumen lain yang dapat memberikan informasi penting (Creswell, 2014). Sumber data internal seperti buku ketetapan muktamar IX PPP pada tahun 2020, dan sumber data eksternal melalui buku atau artikel jurnal berkaitan dengan partai politik Islam, dan permasalahan PKS dan PPP.

1. 9. 4 Informan Penelitian

Informan dapat berupa orang-orang yang mempunyai pengalaman langsung atau terlibat dalam konteks yang diselidiki (Creswell, 2013). Melalui wawancara dengan para informan tersebut, peneliti dapat mengkaji informasi mengenai masalah internal dan eksternal pada penurunan suara PPP pemilihan legislatif tahun 2024. Pada pengambilan informan menggunakan purpose sampling.

Menurut Patton purpose sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih responden yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau posisi yang relevan dengan tujuan penelitian (Patton, 2002). Teknik ini digunakan ketika peneliti ingin memilih individu yang dianggap dapat memberikan informasi yang mendalam dan spesifik terkait topik penelitian. Dalam konteks penelitian ini, purposive sampling sangat cocok untuk memilih responden yang memiliki peran langsung dalam proses pelebagaan partai Persatuan Pembangunan, seperti pengurus partai, calon legislatif, dan yang memiliki pengalaman dalam strategi pemilu.

Tabel 1. 9. 4 Tabel Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1	Muhammad Romahurmuziy	Pengurus Ketua Majelis Pertimbangan PPP
2	Noor Aljanna Fitri Gayo	Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PPP
3	Tobahul Aftoni	Sekretaris Jendral GPK PPP
4	Dr. Ir. M. Qoyum Abdul Jabbar	Ketua OKK DPP PPP
5	Abdullah Mansur, S. Ag. , M. Pd	Calon Legislatif DPR RI PPP Dapil 11 Jawa Barat
6	Yohan Wahyu	Peneliti Kajian Politik
7	Ebyn Atsil Majid	Kader Organisasi PMII

Sumber: (Olahan Peneliti 2025)

Menurut (Creswell 1999) ada tiga macam informan dalam penelitian kualitatif. Dari tabel diatas ketujuh informan dapat menjadi informan utama, informan kunci, dan informan tambahan sebagai berikut:

1. Informan utama: Informan utama adalah individu atau kelompok yang memiliki peran sentral dan langsung dalam proses pengambilan keputusan atau pelaksanaan kebijakan yang menjadi fokus penelitian (Creswell, 1999). Mereka biasanya memiliki pengetahuan mendalam, akses langsung, dan pengaruh signifikan terhadap dinamika yang sedang diteliti (Creswell, 1999). Pada pemilihan informan yang menjadi informan utama yaitu Tobahul Aftoni (Sekretaris Jenderal GPK PPP), Abdullah Mansyur (Mantan Caleg DPR RI PPP Dapil 11 Jawa Barat) dan adalah informan kunci. Mereka memegang posisi strategis dalam struktur organisasi PPP dan memiliki peran kunci dalam mengambil keputusan strategis serta mempengaruhi arah kebijakan partai, khususnya terkait pemilu 2024. Informasi yang diberikan oleh mereka berfokus pada kebijakan internal, strategi kemenangan, serta dinamika hubungan partai dengan koalisi politik, yang sangat relevan dalam menganalisis kegagalan PPP mencapai ambang batas parlemen.
2. Informan kunci: Informan kunci adalah individu yang memiliki wawasan khusus atau pengetahuan lebih mendalam mengenai aspek tertentu dari fenomena yang sedang diteliti (Creswell, 1999). Meskipun mereka tidak selalu terlibat langsung dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan kebijakan, informasi yang mereka miliki sangat penting untuk memberikan perspektif tambahan yang memperkaya pemahaman tentang fenomena yang diteliti (Creswell, 1999). Pada pemilihan informan pada penelitian sebagai informan kunci adalah Muhammad Romahurmuziy (Ketua Majelis

Pertimbangan PPP) , Noor Aljanna Fitri Gayo (Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PPP) dan Dr. Ir. M. Qoyum Abdul Jabbar (Ketua OKK DPP PPP) merupakan informan utama. Keterlibatan mereka dalam proses internal partai dan pengalaman mereka dalam kontestasi politik memberikan perspektif yang sangat diperlukan untuk memahami kekuatan dan kelemahan PPP dalam menghadapi Pemilu 2024.

3. Informan tambahan. Informan tambahan adalah individu yang memberikan informasi pelengkap yang lebih terbatas, namun tetap penting untuk mengisi kesenjangan informasi dalam penelitian (Creswell, 1999). Pada pemilihan informan tambahan pada penelitian ini yaitu Ebyn Atsil Majid (Kader Organisasi PMII) dan Yohan Wahyu (Peneliti Kajian Politik) dapat digolongkan sebagai informan tambahan. Mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berguna untuk memberikan perspektif tambahan mengenai pandangan pemilih pemula, strategi kampanye, serta faktor eksternal yang mempengaruhi elektabilitas PPP.

1. 9. 5 Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) instrumen penelitian adalah instrumen harus dirancang dengan mempertimbangkan konteks penelitian dan karakteristik responden agar data yang diperoleh relevan dan bermanfaat dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2017).

Tabel 1. 9. 5 Operasionalisasi Variabel Teoritis

Konsep/ Teori	Dimensi	Indikator	Pokok Pertanyaan
Teori Pelebagaan Partai Politik Randal dan Svasand	Kesisteman	Kepatuhan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)	1. Bagaimana proses pengambilan keputusan dalam partai Persatuan Pembangunan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)? 2. Apakah terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam AD/ART, dan bagaimana cara partai menangani pelanggaran tersebut? 3. Apa saja tantangan yang dihadapi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam memastikan kepatuhan terhadap AD/ART di seluruh jajaran pengurus dan anggota partai pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024? 4. Bagaimana peran pengawasan internal dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam

			AD/ART? 5. Bagaimana implementasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dalam struktur organisasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) selama Pemilihan Legislatif Tahun 2024?
		Struktur Organisasi	1. Bagaimana struktur organisasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di tingkat pusat dan daerah dalam mendukung pelaksanaan strategi pelebagaan pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024? 2. Apa tantangan yang dihadapi oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam menjaga konsistensi dan kinerja struktur organisasinya selama persiapan menuju Pemilihan Legislatif Tahun 2024? 3. Apa pengaruh dari pembagian tugas dan wewenang di dalam struktur organisasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap efektivitas pelaksanaan strategi kampanye dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2024?

			4. Bagaimana hubungan antara posisi dan wewenang dalam struktur organisasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mempengaruhi pengambilan keputusan strategis pada tingkat nasional dan lokal menjelang Pemilihan Legislatif Tahun 2024? 5. Dalam konteks Pemilihan Legislatif Tahun 2024, bagaimana evaluasi terhadap struktur organisasi di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dapat memberikan dampak pada penyempurnaan mekanisme organisasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika politik yang berkembang?
		Keterlibatan Anggota	1. Apakah partai Persatuan Pembangunan memiliki mekanisme khusus untuk memastikan bahwa suara dan pendapat anggota didengar dalam proses pengambilan keputusan? 2. Apakah anggota partai diberi pelatihan atau pendidikan yang memadai untuk dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan

			keputusan? 3. Dalam konteks Pemilihan Legislatif Tahun 2024, bagaimana evaluasi terhadap struktur organisasi di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dapat memberikan dampak pada penyempurnaan mekanisme organisasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika politik yang berkembang? 4. Bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam mengoptimalkan keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan, dan bagaimana hal ini berpengaruh terhadap keberhasilan partai dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2024? 5. Apa faktor yang memengaruhi tingkat keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan bagaimana faktor-faktor tersebut berperan dalam menentukan hasil Pemilihan Legislatif Tahun 2024?
--	--	--	---

	Identitas nilai	Ideologi Partai	1. Sejauh mana ideologi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berperan dalam membentuk sikap politik dan keputusan strategis partai menjelang Pemilihan Legislatif Tahun 2024? 2. Apa tantangan yang dihadapi oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam mempertahankan ideologi partai yang inklusif dan moderat? 3. Bagaimana ideologi Islam yang moderat mempengaruhi posisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam berkoalisi dengan partai-partai politik lain menjelang Pemilihan Legislatif Tahun 2024? 4. Bagaimana ideologi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memengaruhi hubungan partai dengan konstituen yang lebih muda dan progresif selama Pemilihan Legislatif Tahun 2024? 5. Apa tantangan yang dihadapi oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam mempertahankan kesesuaian antara ideologi partai
--	--------------------	-----------------	---

			dengan kebijakan yang diambil dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2024, terutama terkait dengan dinamika politik yang berubah?
		Nilai-nilai Partai	1. Apa nilai-nilai partai yang PPP dalam pemilihan legislatif 2024? 2. Sejauh mana nilai-nilai partai mempengaruhi hubungan dengan anggota dan pemilih dalam pemilihan legislatif 2024? 3. Bagaimana nilai-nilai keadilan sosial dan keberagaman yang dijunjung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipromosikan dalam kampanye Pemilihan Legislatif Tahun 2024, baik di tingkat lokal maupun nasional? 4. Bagaimana pengaruh penerapan nilai-nilai partai terhadap keterlibatan anggota dan konsolidasi internal dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjelang Pemilihan Legislatif Tahun 2024? 5. Apa peran nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menguatkan strategi pelebagaan Partai Persatuan Pembangunan

			(PPP) dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2024?
	Otonomi keputusan	Pengaruh Pihak Eksternal dalam Pengambilan Keputusan	1. Bagaimana dinamika pengaruh pihak eksternal terhadap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam menghadapi Pemilihan Legislatif Tahun 2024? 2. Bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mengelola pengaruh pihak eksternal dalam pengambilan keputusan? 3. Apa tantangan yang dihadapi oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam merespons tekanan atau pengaruh dari aktor eksternal dalam pengambilan keputusan penting selama Pemilihan Legislatif Tahun 2024? 4. Sejauh mana keputusan-keputusan yang diambil oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipengaruhi oleh kerjasama dengan partai politik lain dalam koalisi politik menjelang Pemilihan Legislatif Tahun 2024?

			5. Bagaimana pengaruh aktor eksternal dalam mempengaruhi keputusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait pemilihan kandidat legislatif yang akan diusung dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2024?
		Independensi dalam Menetapkan Kandidat atau Program	1. Bagaimana independensi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam menentukan calon legislatif yang akan diusung dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2024, terlepas dari pengaruh eksternal? 2. Bagaimana proses seleksi kandidat legislatif di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipengaruhi oleh faktor independensi partai dalam mempertahankan ideologi dan program partai? 3. Apa mekanisme yang diterapkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mencegah intervensi pihak luar dalam menetapkan kandidat atau program dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2024? 4. Bagaimana Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memastikan bahwa keputusan yang diambil mengenai kandidat atau program tidak hanya

			berdasarkan pada kepentingan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan visi jangka panjang partai? 5. Bagaimana independensi dalam menetapkan kandidat atau program dapat mempengaruhi kredibilitas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di mata publik selama Pemilihan Legislatif Tahun 2024?
		Kontrol Terhadap Pengambilan Keputusan Internal	1. Bagaimana struktur organisasi internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mempengaruhi proses kontrol terhadap pengambilan keputusan dan bagaimana hal tersebut berdampak pada efektivitas kebijakan partai? 2. Apa tantangan yang dihadapi oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam menjaga kontrol terhadap pengambilan keputusan internal? 3. Sejauh mana peran pengawasan internal dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berkontribusi pada kualitas keputusan yang

			diambil, terutama dalam merancang strategi kampanye Pemilihan Legislatif Tahun 2024? 4. Bagaimana evaluasi dan audit internal dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan internal tetap sejalan dengan tujuan dan prinsip partai selama Pemilihan Legislatif Tahun 2024? 5. Apa mekanisme yang digunakan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan internal dilakukan secara adil dan transparan, menghindari pengaruh negatif dari luar?
	Citra publik	Citra Publik media sosial	1. Bagaimana PPP menggunakan media sosial dalam menjangkau pemilih sejauh mana efektivitas tersebut? 2. Apa tantangan utama yang dihadapi PPP dalam menyampaikan pesan kepada publik di era digital?

			3. Apa peran influencer dan tokoh publik dalam memperkuat citra publik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di media sosial menjelang Pemilihan Legislatif Tahun 2024? 4. Sejauh mana pengaruh citra publik yang dibangun oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di media sosial mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih dan loyalitas pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024? 5. Bagaimana strategi media sosial Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membedakan dirinya dari partai-partai pesaing dalam upaya memenangkan Pemilihan Legislatif Tahun 2024?
		Reputasi dan Kepercayaan terhadap Partai	1. Sejauh mana kepercayaan publik terhadap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mempengaruhi keputusan pemilih dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2024? 2. Apa dampak dari kepercayaan atau ketidakpercayaan publik terhadap

			Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap kinerja partai dalam menarik dukungan dan mendapatkan suara pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024? 3. Apa peran komunikasi politik yang efektif dalam membangun dan memperkuat reputasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) selama Pemilihan Legislatif Tahun 2024? 4. Sejauh mana pengelolaan isu-isu kontroversial oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap partai dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2024? 5. Bagaimana citra yang dibangun oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui media sosial dan saluran komunikasi lainnya berhubungan dengan tingkat kepercayaan publik terhadap partai selama Pemilihan Legislatif Tahun 2024?
--	--	--	--

		Keterlibatan dalam isu sosial	1. Apa strategi yang diterapkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk meningkatkan visibilitas dan pengaruhnya dalam isu-isu sosial yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di Pemilihan Legislatif Tahun 2024? 2. Bagaimana keterlibatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam isu-isu sosial mempengaruhi reputasi partai di mata pemilih selama Pemilihan Legislatif Tahun 2024? 3. Bagaimana Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengintegrasikan isu-isu sosial dalam strategi kampanye Pemilihan Legislatif Tahun 2024 untuk memperkuat reputasi partai di kalangan pemilih? 4. Bagaimana kesesuaian antara komitmen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap isu sosial dengan kebijakan yang diusung oleh partai dapat mempengaruhi reputasi partai dalam konteks Pemilihan Legislatif Tahun 2024?
--	--	--------------------------------------	---

			5. Bagaimana dampak keterlibatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam isu-isu sosial terhadap reputasi partai di media sosial, dan bagaimana media sosial digunakan untuk memperkuat citra sosial partai menjelang Pemilihan Legislatif Tahun 2024?
--	--	--	--

Sumber: (Olahan Peneliti 2025)



1. 9. 6 Teknik Analisis Data

Menurut Milles dan Huberman dalam teknik pengumpulan data terbagi menjadi tiga macam yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung. Pada penelitian akan menggunakan teknik analisis data untuk menganalisis suatu fenomena yang berjudul Pelembagaan Partai Politik Di Indonesia: Strategi Pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan dalam Pemilihan Legislatif tahun 2024 dalam aspek teori pelembagaan partai politik sebagai berikut:

1. Reduksi Data: Dalam penelitian, Menurut Miles dan Huberman (1992) reduksi data adalah proses berpikir sensitif yang membutuhkan kecerdasan serta pemahaman yang luas dan mendalam tentang penemuan-penemuan pengembangan teori yang penting (Huberman, 1992). Para peneliti telah mengidentifikasi permasalahan utama seperti permasalahan internal dan eksternal partai. Data yang tidak relevan atau berulang dihilangkan untuk memfokuskan analisis pada faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap kesalahan. Hal ini memungkinkan para peneliti untuk menarik kesimpulan yang lebih jelas dan terstruktur mengenai penyebab ketidaklolosan PPP ke senayan 2024.
2. Penyajian Data: Menurut miles dan Huberman (1984) penyajian data merupakan penelitian kualitatif bersifat naratif (Huberman, 1984) Selain itu, diagram alur digunakan untuk menggambarkan proses kampanye yang dilakukan oleh PPP dan titik-titik kritis dimana strategi tersebut tidak

berhasil. Narasi deskriptif juga telah ditambahkan untuk menjelaskan konteks di balik angka-angka tersebut dan memberikan wawasan lebih dalam mengenai strategi pelebagaan yang Partai Persatuan Pembangunan dalam pemilihan legislatif tahun 2024.

3. Penarikan Kesimpulan: Menurut Denzin dan Lincoln (2011) penegertian penarikan kesimpulan adalah hasil masalah dan rumusan masalah yang bersifat sementara dan berkembang setelah berada di lapangan (Lincoln, 2011). Kajian mengenai Strategi Pelebagaan Partai Persatuan Pembangunan Dalam Pemilihan Legislatif tahun 2024 mengambil kesimpulan strategi pelebagaan dan hubungan internal dan eksternal penurunan suara PPP pemilihan legislatif tahun 2024 dengan menggunakan teori pelebagaan partai politik Randal dan Svasand.

1.10. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini perlu membuat pokok inti dari setiap bab pada fenomena penelitian yang ingin diteliti dengan judul “Pelebagaan Partai Politik Di Indonesia: Strategi Pelebagaan Partai Persatuan Pembangunan dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2024.

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini peneliti menyusun dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Kajian Pustaka, Landasan Teoritik dan Koneptual, Bagan Alur Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II Gambaran Objek Penelitian. Pada bab ini peneliti menyusun objek penelitian yaitu Partai Persatuan Pembangunan mulai dari Profil dimulai dari sejarah PPP, ideologi dan nilai PPP, struktur PPP, sistem kerja dan fungsi setiap struktur PPP, caleg PPP.

Bab III Strategi Pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2024. Pada bab ini menjelaskan Strategi Pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan dalam pemilihan legislatif tahun 2024 Pada bab ini bertujuan untuk mengetahui strategi pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan dalam pemilihan legislatif tahun 2024 dengan menggunakan teori pelembagaan partai politik Randall dan Svasand.

Bab IV Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024 Hasil Penelitian Menggunakan Teori Pelembagaan Partai Politik. Dalam bab ini menjelaskan faktor pendukung dan faktor penghambat pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan pada pemilihan legislatif 2024, dengan menggunakan teori pelembagaan partai politik Randall dan Svasand.

Bab V Penutup. Pada bab ini adalah hasil dari proses analisis yang dilakukan peneliti dengan bab sebelumnya tentang Pelembagaan Partai Politik Di Indonesia: Strategi Pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan serta saran kepada peneliti berikutnya untuk memperluas analisis terhadap Pelembagaan Partai Politik Di Indonesia: Strategi Pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan dalam pemilihan legislatif tahun 2024 dalam aspek teori pelembagaan partai politik.